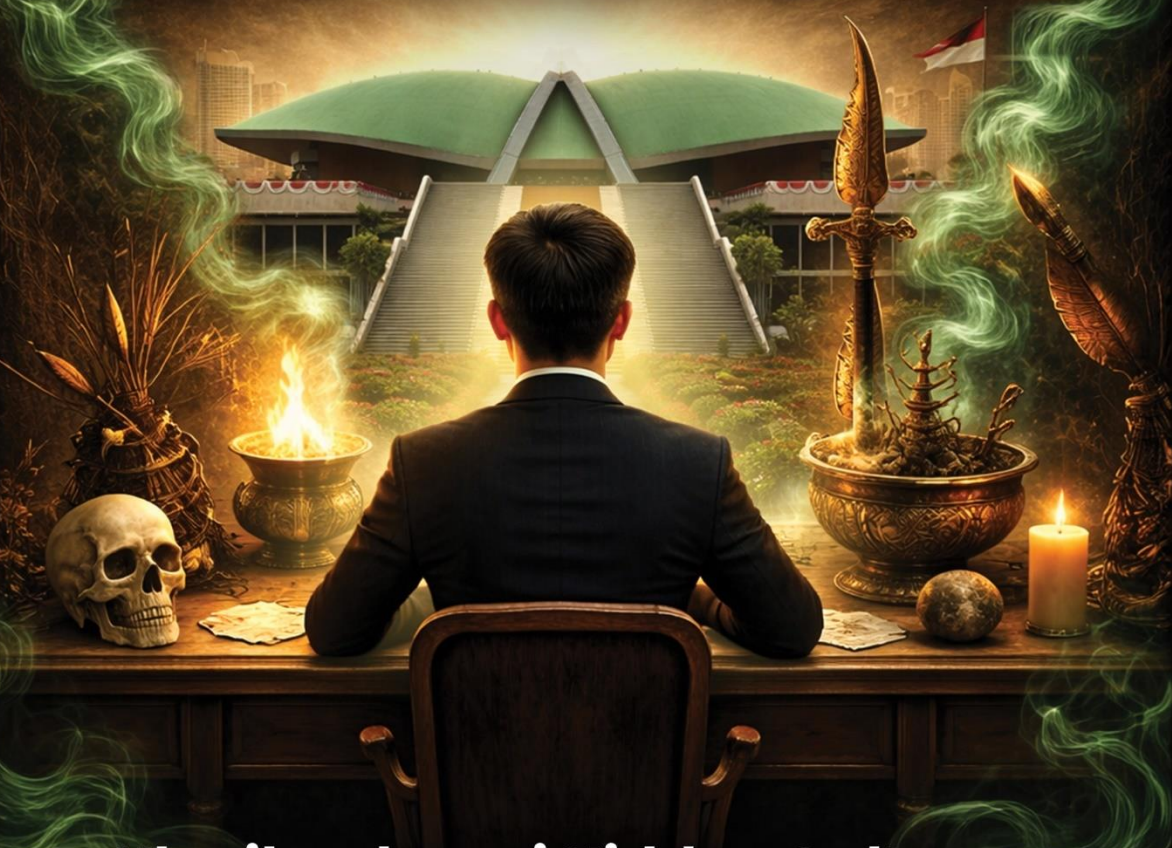


BEHIND THE DECISION



**Klenik sebagai Hidden Culture
Politik Indonesia**

Tri Siswanti

BEHIND THE DECISION

Klenik sebagai Hidden Culture Politik Indonesia

Tri Siswanti



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

BEHIND THE DECISION

Klenik sebagai Hidden Culture Politik Indonesia

Copyright @ 2026 Tri Siswanti

All right reserved

Penulis

Tri Siswanti

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Sungguh Ponten Pranata

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-382-5

Cetakan ke-1, Mei 2026

15,5 x 23 cm, vi + 183 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026068243, 20 Mei 2026

Pencipta

Nama : Tri Siswanti
Alamat : Asrama Polda Kalteng Jl Rinjani No 6 Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Tri Siswanti
Alamat : Asrama Polda Kalteng Jl Rinjani No 6 Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Behind The Decision : Klenik sebagai Hidden Culture Politik Indonesia

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001239612

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan diunggah dalam browser.

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai bangsa yang kaya tradisi menyimpan beragam praktik spiritual, mistis, dan simbolik yang membentuk cara pandang terhadap kepemimpinan. Dalam konteks tertentu, praktik tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari kebudayaan, tetapi juga berkelindan dengan proses pengambilan keputusan, pembentukan legitimasi, dan pencitraan kekuasaan. Di titik inilah klenik tidak lagi dapat dipandang semata sebagai praktik personal, melainkan sebagai fenomena sosial-politik yang memiliki pengaruh nyata.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, membenarkan, ataupun menolak keberadaan praktik klenik dalam kehidupan politik. Sebaliknya, buku ini berupaya memotret realitas tersebut secara kritis, melihatnya sebagai bagian dari dinamika budaya yang mempengaruhi perilaku elite dan persepsi publik. Pendekatan yang digunakan menempatkan klenik sebagai objek kajian yang dapat dipahami melalui perspektif sejarah, antropologi, sosiologi, dan ilmu politik.

Penulisan buku ini juga dilandasi keyakinan bahwa kepemimpinan tidak hanya dibentuk oleh kemampuan teknokratis, tetapi juga oleh sistem nilai, kepercayaan, dan simbol yang hidup di masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut beririsan dengan praktik kekuasaan, muncul ruang interpretasi yang luas antara rasionalitas dan tradisi, antara modernitas dan warisan budaya.

Melalui buku ini, penulis berharap pembaca memperoleh sudut pandang yang lebih jernih dalam memahami relasi antara klenik dan politik di Indonesia. Fenomena yang selama ini dianggap tabu

atau disederhanakan sebagai irasional justru perlu dikaji secara terbuka agar tidak menjadi ruang gelap yang mudah dimanipulasi. Dengan memahami konteksnya, masyarakat dapat melihat secara kritis bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana legitimasi dibangun, dan bagaimana budaya mempengaruhi arah keputusan publik.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN: POLITIK, KEPERCAYAAN, DAN RUANG TAK KASAT MATA	1
1.1 Latar Belakang: Politik Tidak Pernah Sepenuhnya Rasional .	1
1.2 Klenik dalam Konteks Sosial dan Budaya Indonesia.....	6
1.3 Relasi Antara Kekuasaan, Kepercayaan, dan Legitimasi	10
1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan	14
1.5 Kerangka Pemikiran Buku	17
BAB II MEMAHAMI KLENIK: KONSEP, ISTILAH, DAN PERSPEKTIF ILMIAH	23
2.1 Definisi Klenik dalam Perspektif Antropologi.....	23
2.2 Perbedaan Klenik, Mistisisme, dan Spiritualitas.....	27
2.3 Klenik sebagai Sistem Pengetahuan Tradisional	31
2.4 Rasionalitas dan Irasionalitas dalam Praktik Sosial.....	35
2.5 Kritik Akademik terhadap Praktik Klenik.....	39
BAB III SEJARAH KLENIK DALAM STRUKTUR KEKUASAAN NUSANTARA.....	43
3.1 Praktik Mistis pada Kerajaan-Kerajaan Tradisional	43
3.2 Legitimasi Kekuasaan Berbasis Kepercayaan Sakral.....	48
3.3 Peran Dukun, Resi, dan Penasehat Spiritual.....	52
3.4 Klenik dalam Masa Kolonial.....	55
3.5 Transisi ke Era Negara Modern	59
BAB IV POLITIK MODERN DAN WARISAN TRADISI MISTIS	65
4.1 Negara Modern dan Rasionalitas Politik.....	65

4.2 Tradisi Lokal dalam Praktik Kekuasaan Kontemporer.....	69
4.3 Elite Politik dan Praktik Spiritual.....	73
4.4 Simbolisme dan Ritual dalam Proses Politik.....	76
4.5 Dinamika Kepercayaan di Era Demokrasi	80
BAB V RITUAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK.....	85
5.1 Ritual sebagai Instrumen Psikologis Kekuasaan	85
5.2 Konsultasi Spiritual dalam Strategi Politik.....	89
5.3 Waktu, Tanda, dan Simbol dalam Penentuan Kebijakan	93
5.4 Rasionalitas Politik versus Keyakinan Pribadi.....	96
5.5 Studi Kasus Praktik Ritual dalam Keputusan Publik.....	99
BAB VI PENCITRAAN MISTIS DALAM KEPEMIMPINAN	105
6.1 Aura Kepemimpinan dan Persepsi Publik	105
6.2 Narasi Karisma dan Legitimasi Simbolik	108
6.3 Media, Mitos, dan Konstruksi Figur Pemimpin	111
6.4 Dramaturgi Politik dan Unsur Mistisisme.....	114
6.5 Dampak Pencitraan terhadap Kepercayaan Rakyat.....	117
BAB VII KLENIK, BUDAYA POPULER, DAN OPINI PUBLIK	121
7.1 Representasi Klenik dalam Media Massa.....	121
7.2 Cerita Rakyat, Mitos, dan Politik Identitas.....	124
7.3 Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Mistis Elite.....	127
7.4 Klenik sebagai Narasi Politik Populer	130
7.5 Kontestasi antara Rasionalitas dan Tradisi	133
BAB VIII ETIKA, AGAMA, DAN KLENIK DALAM	
KEPEMIMPINAN	137
8.1 Perspektif Agama terhadap Praktik Klenik	137
8.2 Etika Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Publik.....	141
8.3 Konflik Nilai antara Kepercayaan dan Kebijakan	145
8.4 Spiritualitas Autentik versus Praktik Simbolik	148
8.5 Moralitas Kekuasaan di Tengah Tradisi.....	152
BAB IX DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK PRAKTIK KLENIK.....	157
9.1 Pengaruh terhadap Proses Demokrasi.....	157
9.2 Kepercayaan Publik terhadap Pemimpin	160
9.3 Risiko Manipulasi dan Penyalahgunaan.....	164
9.4 Klenik sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan.....	167
9.5 Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan	171

BAB X MASA DEPAN POLITIK INDONESIA: RASIONALITAS, TRADISI, DAN TRANSFORMASI	175
10.1 Modernisasi dan Perubahan Cara Berpikir Politik.....	175
10.2 Peran Pendidikan dalam Membentuk Kesadaran Rasional	178
10.3 Tradisi Lokal sebagai Warisan Budaya, Bukan Instrumen Kekuasaan	182
10.4 Rekonstruksi Etika Kepemimpinan Indonesia	185
DAFTAR PUSTAKA	189
PROFIL PENULIS.....	191

BAB I

PENDAHULUAN: POLITIK, KEPERCAYAAN, DAN RUANG TAK KASAT MATA

1.1 Latar Belakang: Politik Tidak Pernah Sepenuhnya Rasional

Politik modern sering dipromosikan sebagai ruang rasional: tempat data, strategi, dan kepentingan publik dipertimbangkan secara sistematis untuk menghasilkan keputusan terbaik. Dalam teori, politik adalah urusan kebijakan, regulasi, dan perencanaan. Dalam praktik, politik adalah arena manusia dan manusia tidak pernah sepenuhnya rasional. Ada emosi, keyakinan, simbol, trauma kolektif, hingga kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Di titik inilah rasionalitas formal bertemu dengan wilayah tak kasatmata yang ikut memengaruhi arah kekuasaan.

Indonesia adalah contoh paling menarik untuk memahami paradoks ini. Negara dengan sistem demokrasi modern, pemilu berkala, lembaga negara yang mapan, dan tata kelola administratif yang terus diperbaiki, namun di saat yang sama masih menyimpan tradisi kuat tentang makna simbol, tanda, restu, dan ritual. Politik berjalan di dua jalur: jalur resmi yang tercatat dalam dokumen, dan jalur tidak resmi yang hidup dalam keyakinan, relasi personal, dan praktik kultural.

Keputusan politik di Indonesia jarang lahir murni dari kalkulasi rasional. Banyak faktor non-teknokratis yang ikut bermain: pertimbangan psikologis, persepsi publik, tekanan kelompok, bahkan tafsir terhadap pertanda atau legitimasi simbolik. Dalam banyak kasus, seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan “apa yang benar secara kebijakan”, tetapi juga “apa yang dapat diterima secara budaya”, “apa yang terasa aman secara batin”, dan “apa yang menjaga citra di mata publik”.

Rasionalitas politik, pada kenyataannya, selalu bernegosiasi dengan budaya. Dalam masyarakat yang memiliki sejarah panjang tentang relasi antara kekuasaan dan kepercayaan, politik tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai peristiwa yang sarat makna. Jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi juga simbol kehormatan, legitimasi moral, bahkan dalam banyak pandangan mandat yang memiliki dimensi spiritual.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Nusantara. Pada masa kerajaan, kekuasaan tidak berdiri di atas legitimasi hukum formal semata. Kekuasaan dilegitimasi oleh mitos, garis keturunan, wahyu, dan simbol sakral. Raja tidak hanya pemimpin administratif, tetapi juga pusat kosmos, penjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Dalam struktur seperti itu, ritual bukan pelengkap, melainkan bagian dari mekanisme kekuasaan.

Warisan cara berpikir ini tidak hilang ketika Indonesia memasuki era negara modern. Ia bertransformasi, beradaptasi, dan terkadang bersembunyi di balik bahasa baru. Negara boleh berubah, sistem boleh berganti, tetapi budaya berpikir masyarakat tidak berubah secepat regulasi. Tradisi lama tetap hidup, meski sering dibungkus dengan istilah baru atau dijalankan secara lebih privat.

Dalam konteks ini, klenik bukan sekadar praktik mistis yang terpisah dari politik. Ia adalah bagian dari budaya yang membentuk cara orang memahami risiko, keberuntungan, legitimasi, dan kekuasaan. Banyak keputusan politik diambil dalam suasana yang

tidak sepenuhnya rasional, bukan karena para pelakunya tidak cerdas, tetapi karena mereka hidup dalam sistem makna yang lebih kompleks dari sekadar logika kebijakan.

Seorang kandidat kepala daerah, misalnya, tidak hanya menyusun strategi kampanye berbasis data pemilih dan analisis elektoral. Ia juga mempertimbangkan momentum, restu tokoh, simbol, bahkan dalam beberapa kasus ritual tertentu yang diyakini dapat memperkuat legitimasi atau kepercayaan diri. Hal serupa terjadi pada tingkat nasional, meski sering tidak diakui secara terbuka. Politik adalah permainan persepsi, dan persepsi sering dibangun dari hal-hal yang tidak sepenuhnya rasional.

Fenomena ini juga terlihat dalam cara publik menilai pemimpin. Masyarakat tidak selalu memilih berdasarkan program atau kompetensi semata. Ada faktor karisma, aura, narasi personal, dan kesan “ditakdirkan memimpin” yang sering memengaruhi pilihan. Narasi tentang pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, atau memiliki perjalanan hidup yang “tidak biasa” sering lebih kuat daripada data kebijakan.

Di sinilah rasionalitas politik bertemu dengan dramaturgi sosial. Politik bukan hanya tentang keputusan, tetapi juga tentang cerita. Cerita tentang asal-usul, perjuangan, penderitaan, hingga simbol-simbol yang menempel pada figur pemimpin. Cerita ini membentuk persepsi, dan persepsi membentuk legitimasi.

Klenik masuk dalam ruang ini sebagai salah satu elemen budaya yang menyediakan makna. Ia memberi kerangka interpretasi terhadap keberhasilan dan kegagalan. Ketika seorang pemimpin naik, ada yang melihatnya sebagai hasil kerja keras. Ketika seorang pemimpin jatuh, ada yang menafsirkannya sebagai tanda bahwa legitimasi batinnya lemah. Tafsir seperti ini tidak berdiri di atas logika ilmiah, tetapi memiliki daya pengaruh sosial yang nyata.

Tidak sedikit elite politik yang, secara terbuka atau diam-diam, memanfaatkan ruang kepercayaan ini. Mereka memahami bahwa masyarakat tidak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga

simbolik. Dalam ruang simbolik itulah citra dibangun, aura dibentuk, dan legitimasi diperkuat. Ritual, ziarah, atau kedekatan dengan tokoh spiritual sering menjadi bagian dari strategi pembentukan citra.

Fenomena ini tidak selalu berarti manipulasi. Dalam banyak kasus, ia adalah refleksi dari keyakinan pribadi. Pemimpin adalah manusia yang hidup dalam budaya yang sama dengan masyarakatnya. Mereka tumbuh dengan cerita, simbol, dan kepercayaan yang membentuk cara mereka memaknai kekuasaan. Ketika berada dalam posisi mengambil keputusan besar, wajar jika pertimbangan rasional bercampur dengan pertimbangan batin.

Namun persoalannya menjadi serius ketika praktik tersebut masuk ke ruang kebijakan publik. Ketika keputusan yang berdampak pada jutaan orang dipengaruhi oleh keyakinan non-rasional, muncul pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi. Apakah kebijakan dibuat berdasarkan analisis objektif, atau berdasarkan tafsir subjektif? Apakah negara berjalan dengan prinsip rasionalitas, atau mengikuti dinamika kepercayaan personal pemimpinnya?

Di titik ini, politik menunjukkan wajahnya yang paling kompleks. Ia bukan ilmu pasti. Ia adalah kombinasi antara logika, emosi, kepentingan, dan budaya. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya steril dari pengaruh non-rasional. Bahkan dalam sistem paling maju sekalipun, faktor intuisi, persepsi, dan keyakinan pribadi tetap memainkan peran.

Indonesia hanya memperlihatkan fenomena ini dengan lebih jelas karena konteks budayanya yang kaya. Tradisi lisan, kepercayaan lokal, dan sejarah panjang tentang relasi antara manusia dan dunia tak kasatmata membuat masyarakat lebih terbiasa melihat realitas dalam lapisan yang beragam. Rasionalitas tidak ditolak, tetapi tidak dijadikan satu-satunya kerangka memahami dunia.

Di era modern, kontradiksi ini semakin terlihat. Di satu sisi, negara mendorong profesionalisme, tata kelola berbasis data, dan

kebijakan berbasis bukti. Di sisi lain, praktik simbolik dan kepercayaan tetap hidup dalam ruang privat maupun publik. Media sosial bahkan mempercepat penyebaran narasi mistis, mitos, dan simbol yang berkaitan dengan figur politik.

Politik akhirnya menjadi ruang hibrid: modern sekaligus tradisional, rasional sekaligus simbolik. Di ruang ini, klenik tidak selalu hadir sebagai praktik ekstrem. Ia sering muncul dalam bentuk yang halus: pilihan waktu, simbol tertentu, narasi karisma, atau relasi dengan figur yang dianggap memiliki “daya batin”. Semua itu membentuk atmosfer yang memengaruhi cara keputusan dipersepsikan dan diterima. Memahami politik Indonesia tanpa melihat dimensi ini akan menghasilkan analisis yang timpang. Rasionalitas penting, tetapi tidak cukup. Data penting, tetapi tidak menjelaskan semuanya. Ada wilayah yang bekerja di bawah permukaan wilayah makna, simbol, dan keyakinan yang memengaruhi arah kekuasaan.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa politik tidak pernah sepenuhnya rasional. Ia adalah produk manusia, dan manusia selalu hidup dalam jaringan kepercayaan. Klenik, dalam konteks ini, tidak diposisikan sebagai kebenaran atau kesalahan, tetapi sebagai fenomena budaya yang memiliki pengaruh nyata. Ia adalah bagian dari ekosistem makna yang membentuk cara kekuasaan dijalankan dan dipahami. Ketika politik hanya dibaca sebagai proses administratif, banyak hal terlewat. Ketika politik dibaca sebagai fenomena budaya, lapisan-lapisan yang tersembunyi mulai terlihat. Di sanalah keputusan tidak lagi tampak sederhana. Ia menjadi hasil dari tarik-menarik antara logika, kepentingan, emosi, dan keyakinan.

Realitas ini menantang cara kita memahami kepemimpinan. Pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan rasional. Ia adalah manusia yang membawa sejarah, kepercayaan, ketakutan, dan harapan. Dalam setiap keputusan besar, selalu ada ruang di mana rasionalitas bertemu dengan sesuatu yang lebih dalam sesuatu

yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan angka, tetapi tetap memengaruhi arah tindakan.

Politik, pada akhirnya, adalah cermin manusia. Selama manusia tidak sepenuhnya rasional, politik juga tidak akan pernah sepenuhnya rasional. Dan selama budaya masih hidup, praktik simbolik, ritual, dan kepercayaan akan terus menjadi bagian dari cara kekuasaan bekerja baik diakui maupun disangkal.

Di situlah latar belakang buku ini berdiri: pada pengakuan bahwa ada ruang di balik keputusan. Ruang yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu hadir. Ruang tempat logika bertemu keyakinan, tempat strategi bertemu simbol, dan tempat kekuasaan bertemu budaya. Dari ruang itulah banyak keputusan lahir bukan hanya sebagai produk kebijakan, tetapi sebagai refleksi cara sebuah bangsa memahami makna memimpin dan dipimpin.

1.2 Klenik dalam Konteks Sosial dan Budaya Indonesia

Klenik tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah panjang, dari cara manusia Nusantara memahami alam, kehidupan, dan kekuasaan. Dalam masyarakat yang selama berabad-abad hidup berdampingan dengan mitos, simbol, dan ritual, klenik bukan sekadar praktik tersembunyi atau fenomena pinggiran. Ia merupakan bagian dari sistem makna yang membentuk cara orang melihat realitas termasuk realitas politik.

Di Indonesia, batas antara rasional dan irasional tidak pernah benar-benar kaku. Tradisi lokal memperlihatkan bahwa pengetahuan tidak hanya bersumber dari pengalaman empiris, tetapi juga dari intuisi, wahyu, atau tafsir terhadap tanda-tanda tertentu. Dalam masyarakat agraris, misalnya, keputusan menanam, memanen, atau membuka lahan sering dipengaruhi oleh perhitungan yang tidak semata berbasis sains, tetapi juga berdasarkan keyakinan terhadap waktu, arah, atau simbol tertentu. Cara berpikir ini tidak hilang begitu saja ketika masyarakat memasuki era modern.

Klenik dalam konteks sosial Indonesia sering kali hadir sebagai mekanisme memahami ketidakpastian. Hidup selalu mengandung risiko: gagal, sakit, kalah, kehilangan. Dalam kondisi seperti itu, manusia mencari pegangan. Ada yang memilih pendekatan rasional, ada pula yang mencari makna melalui praktik simbolik dan spiritual. Klenik menjadi salah satu cara mengelola kecemasan kolektif memberi rasa kontrol ketika logika tidak memberi jawaban pasti.

Dalam kebudayaan Jawa, misalnya, konsep harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib menjadi fondasi cara berpikir. Kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai hasil kompetisi politik, tetapi juga sebagai bagian dari keseimbangan kosmis. Seorang pemimpin dianggap tidak sekadar kuat secara administratif, tetapi juga memiliki “daya batin” yang membuatnya layak memimpin. Persepsi semacam ini masih hidup dalam berbagai bentuk, meskipun tidak selalu diungkapkan secara eksplisit.

Di banyak daerah lain, praktik serupa juga ditemukan. Ritual adat, ziarah ke tempat tertentu, atau penghormatan terhadap tokoh spiritual menjadi bagian dari kehidupan sosial. Semua itu membentuk lanskap budaya yang membuat klenik tidak terasa asing. Ia bukan fenomena individual, melainkan bagian dari struktur sosial yang diwariskan lintas generasi. Yang menarik, klenik tidak selalu dipraktikkan secara ekstrem. Dalam banyak kasus, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus: pilihan hari baik, simbol tertentu, atau kepercayaan bahwa tindakan tertentu membawa keberuntungan atau malapetaka. Hal-hal semacam ini sering dianggap sepele, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap perilaku sosial.

Budaya Indonesia juga memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak selalu dipertentangkan dengan agama formal. Dalam praktik sehari-hari, banyak orang menjalankan ajaran agama sekaligus memegang tradisi lokal yang memiliki unsur mistis. Keduanya tidak selalu dianggap bertentangan, tetapi dipahami sebagai bagian dari pengalaman spiritual yang berlapis. Inilah yang membuat

klenik bertahan: ia beradaptasi, menyatu, dan mengambil bentuk baru sesuai konteks zaman.

Ketika masyarakat memasuki era modern, klenik tidak hilang. Ia berubah. Media massa, televisi, dan kini media sosial justru memperluas ruang penyebarannya. Cerita tentang tokoh yang memiliki karisma “tidak biasa”, tempat yang dianggap memiliki energi tertentu, atau ritual yang diyakini membawa keberuntungan beredar dengan cepat. Narasi semacam ini membentuk opini publik, meskipun sering tidak diverifikasi secara rasional. Dalam konteks sosial, klenik juga berfungsi sebagai alat identitas. Ia menjadi bagian dari kebanggaan budaya, penanda keunikan lokal, dan simbol keterhubungan dengan masa lalu. Banyak komunitas mempertahankan ritual bukan semata karena percaya, tetapi karena melihatnya sebagai warisan yang harus dijaga. Tradisi semacam ini memperlihatkan bahwa klenik tidak selalu berdiri sebagai praktik individual, melainkan sebagai fenomena kolektif.

Namun di sisi lain, keberadaan klenik juga menimbulkan ambiguitas. Ketika ia masuk ke ruang publik, terutama ruang politik, muncul pertanyaan tentang batas antara budaya dan kekuasaan. Apakah praktik tersebut masih berada dalam ranah personal, atau telah menjadi instrumen untuk membangun legitimasi? Apakah ia sekadar tradisi, atau sudah menjadi strategi?

Fenomena ini terlihat ketika figur publik menampilkan kedekatan dengan simbol-simbol tertentu. Kunjungan ke situs sejarah, relasi dengan tokoh spiritual, atau narasi tentang perjalanan batin sering muncul dalam konstruksi citra. Bagi sebagian masyarakat, itu memperkuat kepercayaan. Bagi yang lain, itu dianggap sebagai bentuk manipulasi. Di sinilah klenik berada di wilayah abu-abu: antara keyakinan, budaya, dan strategi sosial.

Indonesia sebagai masyarakat majemuk memperlihatkan variasi yang luas dalam praktik ini. Tidak semua daerah memiliki intensitas yang sama, tidak semua kelompok memaknainya dengan cara yang sama. Ada yang melihatnya sebagai tradisi luhur, ada yang menganggapnya sebagai takhayul, ada pula yang

memandangnya sebagai bagian dari identitas kultural yang netral. Perbedaan tafsir ini membuat klenik tetap hidup, karena tidak pernah benar-benar disepakati sebagai sesuatu yang harus ditolak atau diterima sepenuhnya.

Modernisasi, pendidikan, dan perkembangan teknologi memang mendorong cara berpikir rasional. Namun proses ini tidak selalu menggantikan tradisi. Dalam banyak kasus, keduanya berjalan berdampingan. Seseorang bisa sangat rasional dalam pekerjaan, tetapi tetap memegang kepercayaan tertentu dalam kehidupan personal. Kontradiksi ini bukan anomali, melainkan bagian dari realitas sosial manusia. Klenik juga memiliki dimensi psikologis yang tidak bisa diabaikan. Ia memberi rasa aman, rasa terhubung, dan rasa memiliki kontrol atas situasi yang tidak pasti. Dalam masyarakat yang sering berhadapan dengan ketidakstabilan ekonomi, konflik sosial, atau perubahan cepat, praktik semacam ini menjadi mekanisme bertahan. Ia tidak selalu logis, tetapi terasa bermakna.

Ketika dilihat dari sudut pandang budaya, klenik bukan sekadar praktik mistis. Ia adalah bahasa simbolik. Ia berbicara tentang ketakutan, harapan, dan cara manusia mencari makna. Ia juga mencerminkan cara masyarakat memahami kekuasaan: bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki dimensi moral dan spiritual.

Dalam konteks inilah klenik bersinggungan dengan politik. Politik bukan ruang steril yang terpisah dari budaya. Ia justru lahir dari budaya. Nilai, simbol, dan keyakinan yang hidup di masyarakat akan selalu memengaruhi cara kekuasaan dijalankan. Pemimpin adalah produk dari lingkungan sosialnya. Ia membawa nilai, kepercayaan, dan cara berpikir yang terbentuk sejak lama. Memahami klenik dalam konteks sosial dan budaya Indonesia berarti memahami bahwa praktik tersebut tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan sejarah, identitas, dan cara masyarakat membangun makna. Ia tidak selalu rasional, tetapi juga tidak bisa dihapus begitu saja. Selama manusia masih mencari makna di luar logika, selama

ketidakpastian masih menjadi bagian dari kehidupan, praktik simbolik akan terus hidup.

Klenik bertahan bukan karena masyarakat menolak rasionalitas, tetapi karena rasionalitas tidak selalu cukup untuk menjawab semua pertanyaan eksistensial. Ketika ilmu menjelaskan “bagaimana”, manusia tetap mencari “mengapa”. Di ruang pencarian itulah simbol, ritual, dan kepercayaan menemukan tempatnya. Indonesia, dengan kompleksitas budayanya, menjadi lahan subur bagi keberlanjutan praktik ini. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi selalu hadir dalam percakapan, narasi, dan tindakan sosial. Ia membentuk cara orang melihat keberhasilan, kegagalan, dan legitimasi. Ia memengaruhi cara pemimpin dipersepsikan dan cara keputusan dimaknai.

Membaca klenik dalam konteks sosial dan budaya berarti membaca Indonesia dalam bentuk yang paling jujur: masyarakat yang modern sekaligus tradisional, rasional sekaligus simbolik, terbuka sekaligus menyimpan lapisan makna yang tidak selalu terlihat. Di sanalah politik tidak hanya dipahami sebagai mekanisme kekuasaan, tetapi juga sebagai peristiwa budaya peristiwa yang selalu dipengaruhi oleh cara manusia percaya, berharap, dan memberi makna pada dunia yang mereka huni.

1.3 Relasi Antara Kekuasaan, Kepercayaan, dan Legitimasi

Kekuasaan tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu membutuhkan sesuatu yang membuatnya diterima, diakui, dan dianggap sah. Dalam teori politik, legitimasi sering dijelaskan melalui hukum, konstitusi, dan mekanisme demokrasi. Namun dalam praktik sosial, legitimasi tidak hanya lahir dari aturan formal. Ia tumbuh dari kepercayaan dan kepercayaan tidak selalu dibangun oleh rasionalitas semata.

Seorang pemimpin bisa memiliki jabatan, tetapi belum tentu memiliki legitimasi. Jabatan memberi otoritas administratif, sementara legitimasi memberi penerimaan sosial. Tanpa

legitimasi, kekuasaan menjadi rapuh, mudah dipertanyakan, dan rentan kehilangan dukungan. Di sinilah kepercayaan memainkan peran yang menentukan. Masyarakat tidak hanya ingin dipimpin oleh orang yang “sah secara hukum”, tetapi juga oleh sosok yang “layak dipercaya”.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara kekuasaan dan kepercayaan memiliki akar historis yang panjang. Pada masa kerajaan, legitimasi tidak semata dibangun melalui kekuatan militer atau struktur birokrasi. Ia dibangun melalui simbol, narasi, dan keyakinan kolektif. Raja dianggap memiliki hubungan khusus dengan kekuatan kosmis, memiliki mandat yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga spiritual. Legitimasi semacam ini tidak lahir dari pemilu, melainkan dari kepercayaan yang dibangun melalui ritual, mitos, dan tradisi.

Warisan cara berpikir ini tidak hilang begitu saja dalam sistem politik modern. Ia berubah bentuk. Dalam demokrasi, legitimasi formal diperoleh melalui pemilihan umum, tetapi legitimasi sosial tetap membutuhkan sesuatu yang lebih dalam. Masyarakat ingin melihat karakter, integritas, dan bahkan “aura” tertentu dari seorang pemimpin. Aura ini tidak bisa diukur dengan indikator statistik, tetapi sangat memengaruhi persepsi publik. Kepercayaan adalah fondasi tak terlihat dari kekuasaan. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan ditolak. Tanpa kepercayaan, pidato yang paling rasional pun akan terdengar kosong. Kepercayaan membuat masyarakat bersedia mengikuti, menerima, bahkan bertahan dalam situasi sulit. Ia adalah energi sosial yang membuat kekuasaan dapat berjalan tanpa paksaan.

Di sinilah klenik menemukan ruangnya. Dalam masyarakat yang masih memberi ruang pada simbol dan makna spiritual, legitimasi tidak selalu dibangun melalui bahasa kebijakan. Ia sering dibangun melalui narasi karisma, kedekatan dengan tradisi, atau citra sebagai sosok yang memiliki “daya batin”. Narasi ini tidak selalu rasional, tetapi efektif dalam membangun kepercayaan.

Banyak figur publik memahami bahwa legitimasi tidak cukup dibangun melalui program. Mereka membangun cerita. Cerita tentang perjalanan hidup, kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, hingga relasi dengan simbol-simbol budaya. Cerita ini menciptakan ikatan emosional. Ketika ikatan emosional terbentuk, legitimasi menjadi lebih kuat daripada sekadar angka dukungan.

Kekuasaan modern sering berusaha tampil rasional dan profesional. Namun di balik itu, mekanisme simbolik tetap bekerja. Pemilihan waktu, lokasi, gestur, bahkan cara berpakaian bisa menjadi bagian dari strategi membangun legitimasi. Semua itu berbicara pada wilayah psikologis masyarakat wilayah yang tidak selalu disentuh oleh bahasa kebijakan.

Relasi antara kekuasaan dan kepercayaan juga terlihat dalam cara masyarakat merespons krisis. Dalam situasi normal, legitimasi bisa dibangun melalui prosedur. Dalam situasi krisis, legitimasi ditentukan oleh kepercayaan. Ketika ketidakpastian meningkat, masyarakat mencari figur yang memberi rasa aman. Rasa aman ini tidak selalu lahir dari rasionalitas, tetapi dari keyakinan bahwa pemimpin tersebut “punya sesuatu” yang membuatnya mampu menghadapi situasi. Klenik, dalam konteks ini, sering menjadi bagian dari konstruksi legitimasi. Ia menyediakan bahasa simbolik untuk menjelaskan karisma. Seorang pemimpin dianggap memiliki “restu”, “tuah”, atau “energi” tertentu. Istilah-istilah ini tidak ilmiah, tetapi memiliki daya pengaruh. Ia membuat kekuasaan terasa lebih dari sekadar jabatan administratif.

Namun relasi ini juga mengandung risiko. Ketika legitimasi dibangun melalui simbol dan kepercayaan tanpa kontrol rasional, ruang manipulasi menjadi terbuka. Citra bisa dibentuk, narasi bisa direkayasa, dan simbol bisa dipakai untuk menutupi kelemahan kebijakan. Masyarakat yang terlalu bergantung pada simbol mudah terjebak dalam persepsi, bukan realitas. Di sisi lain, menolak sepenuhnya dimensi kepercayaan juga bukan solusi. Politik bukan mesin yang bekerja dengan logika semata. Ia adalah interaksi manusia. Dalam interaksi itu, emosi, keyakinan, dan makna selalu

hadir. Mengabaikan dimensi ini membuat analisis politik menjadi kering dan tidak memahami realitas sosial.

Relasi antara kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi selalu bergerak. Ia tidak statis. Ketika kepercayaan publik meningkat, legitimasi menguat. Ketika kepercayaan runtuh, legitimasi ikut goyah, bahkan jika kekuasaan secara formal masih utuh. Banyak rezim runtuh bukan karena kalah secara administratif, tetapi karena kehilangan kepercayaan. Indonesia memperlihatkan dinamika ini dengan jelas. Pergantian pemimpin sering diiringi perubahan narasi legitimasi. Figur yang sebelumnya dianggap kuat bisa kehilangan pengaruh ketika kepercayaan publik bergeser. Sebaliknya, figur yang awalnya dipandang biasa bisa mendapatkan legitimasi ketika narasi tentang dirinya diterima oleh masyarakat.

Kepercayaan juga tidak selalu rasional. Ia bisa dipengaruhi oleh simbol, cerita, bahkan mitos. Dalam konteks budaya yang kaya, kepercayaan tidak dibangun hanya melalui argumen, tetapi juga melalui pengalaman kolektif dan ingatan sosial. Pemimpin yang mampu menyentuh ingatan kolektif sering lebih mudah mendapatkan legitimasi. Di sinilah peran budaya menjadi penting. Budaya menyediakan kerangka makna yang membuat kekuasaan dapat diterima. Tanpa kerangka itu, kekuasaan terasa asing. Ketika pemimpin mampu beresonansi dengan budaya, legitimasi mengalir lebih alami. Ketika pemimpin terputus dari budaya, legitimasi terasa dipaksakan.

Relasi antara kekuasaan dan kepercayaan bukan hubungan satu arah. Kekuasaan membentuk kepercayaan, dan kepercayaan membentuk kekuasaan. Pemimpin yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan kebijakan. Kebijakan yang berhasil akan memperkuat kepercayaan. Siklus ini bisa memperkuat legitimasi, tetapi juga bisa runtuh jika salah satu elemennya terganggu.

Klenik berada di antara relasi ini sebagai salah satu medium. Ia bukan satu-satunya faktor, tetapi sering menjadi bagian dari mekanisme simbolik yang memperkuat legitimasi. Dalam beberapa kasus, ia hadir sebagai keyakinan personal. Dalam kasus lain, ia

menjadi alat strategis. Batas antara keduanya sering kabur. Memahami relasi ini berarti memahami bahwa politik bukan hanya soal siapa berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan diterima. Legitimasi adalah jembatan antara kekuasaan dan masyarakat. Tanpa jembatan itu, kekuasaan berdiri sendiri, kaku, dan mudah retak.

Kepercayaan adalah fondasi jembatan tersebut. Ia tidak selalu terlihat, tetapi menentukan apakah jembatan itu kokoh atau rapuh. Ia dibangun perlahan, melalui pengalaman, simbol, dan konsistensi. Ia juga bisa runtuh seketika ketika masyarakat merasa dikhianati. Di titik ini, politik memperlihatkan sifatnya yang paling manusiawi. Ia bukan sekadar sistem, tetapi relasi. Relasi antara pemimpin dan yang dipimpin, antara kekuasaan dan makna, antara keputusan dan keyakinan. Relasi ini tidak pernah sepenuhnya rasional, karena manusia sendiri tidak sepenuhnya rasional.

Selama manusia masih mencari makna di balik kekuasaan, selama masyarakat masih membutuhkan figur yang dipercaya, relasi antara kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi akan terus menjadi inti dari politik. Dan selama itu pula, simbol, ritual, dan kepercayaan termasuk yang sering disebut klenik akan tetap memiliki tempat dalam cara kekuasaan dipahami dan dijalankan.

1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Pembahasan tentang politik sering terjebak pada dua kutub yang saling meniadakan. Di satu sisi, politik dipandang sepenuhnya rasional digerakkan oleh kalkulasi, strategi, dan kepentingan. Di sisi lain, praktik-praktik non-rasional seperti simbol, ritual, dan kepercayaan sering didorong ke pinggir sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak ilmiah. Padahal, realitas sosial Indonesia memperlihatkan bahwa keduanya tidak pernah benar-benar terpisah.

Klenik hadir di ruang yang jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi terus memengaruhi cara masyarakat memaknai kepemimpinan dan kekuasaan. Ia muncul dalam narasi karisma,

simbol legitimasi, hingga praktik-praktik yang menyertai perjalanan politik seorang figur publik. Fenomena ini tidak selalu tampak di permukaan, namun meninggalkan jejak dalam cara keputusan diambil, cara citra dibangun, dan cara kekuasaan diterima.

Masalahnya bukan sekadar apakah praktik klenik itu ada atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana praktik tersebut beroperasi dalam struktur sosial dan politik. Apakah ia sekadar ekspresi budaya personal, atau sudah menjadi bagian dari mekanisme legitimasi kekuasaan? Apakah ia memperkuat kepercayaan publik, atau justru membuka ruang manipulasi simbolik? Apakah politik Indonesia dapat sepenuhnya dilepaskan dari pengaruh sistem makna yang hidup dalam masyarakatnya?

Rumusan masalah dalam buku ini berangkat dari kesadaran bahwa politik tidak pernah berdiri dalam ruang steril. Ia selalu bersinggungan dengan budaya, kepercayaan, dan cara masyarakat memahami realitas. Oleh karena itu, buku ini memusatkan perhatian pada beberapa persoalan utama: bagaimana klenik terbentuk sebagai fenomena sosial, bagaimana ia berkelindan dengan praktik kekuasaan, bagaimana ia memengaruhi konstruksi legitimasi, dan bagaimana masyarakat memaknainya dalam konteks politik modern.

Selain itu, buku ini juga mempertanyakan batas antara keyakinan personal dan keputusan publik. Ketika pemimpin membawa nilai, kepercayaan, dan praktik simbolik ke dalam ruang kekuasaan, muncul pertanyaan tentang tanggung jawab. Sampai sejauh mana kepercayaan pribadi boleh memengaruhi kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas? Di mana garis yang memisahkan budaya, strategi, dan manipulasi?

Rumusan masalah ini penting karena selama ini klenik sering dibahas dalam dua cara yang sama-sama reduktif: disederhanakan sebagai takhayul, atau justru dibesar-besarkan sebagai faktor penentu utama kekuasaan. Kedua pendekatan ini tidak memadai.

Klenik perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang kompleks tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi juga tidak bisa diterima tanpa kritik.

Tujuan penulisan buku ini adalah membuka ruang pembacaan yang lebih jernih terhadap relasi antara klenik dan politik di Indonesia. Buku ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan praktik tertentu, juga tidak untuk menolaknya secara apriori. Tujuannya adalah memahami memahami konteks sosialnya, sejarahnya, fungsi simboliknya, dan dampaknya terhadap praktik kekuasaan.

Secara lebih spesifik, penulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana klenik terbentuk sebagai bagian dari budaya politik; menguraikan bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan struktur kekuasaan; dan menelaah bagaimana simbol, ritual, dan kepercayaan digunakan untuk membangun legitimasi. Penulisan ini juga ingin menunjukkan bahwa politik tidak hanya bergerak dalam bahasa kebijakan, tetapi juga dalam bahasa makna.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah mendorong sikap kritis. Ketika masyarakat memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui sistem formal, tetapi juga melalui simbol dan kepercayaan, ruang manipulasi menjadi lebih mudah dikenali. Pemahaman semacam ini penting agar publik tidak hanya menjadi penonton dalam panggung politik, tetapi mampu membaca bagaimana citra dibangun dan bagaimana legitimasi dibentuk.

Buku ini juga berupaya menjembatani dua pendekatan yang sering dipertentangkan: rasionalitas modern dan tradisi budaya. Modernisasi tidak harus berarti meniadakan tradisi, tetapi juga tidak berarti menerima tradisi tanpa refleksi. Keduanya dapat dipahami dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari dinamika sosial yang terus berubah.

Penulisan ini sekaligus menjadi upaya untuk melihat politik Indonesia secara lebih utuh. Politik bukan hanya soal lembaga, regulasi, dan angka elektoral. Ia juga soal ingatan kolektif, simbol, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Mengabaikan dimensi ini membuat analisis politik kehilangan konteksnya.

Di tengah perubahan zaman yang cepat, relasi antara kekuasaan dan budaya justru semakin penting untuk dibaca. Teknologi, media sosial, dan globalisasi tidak menghapus praktik simbolik, tetapi sering memberi bentuk baru. Narasi karisma, aura, dan legitimasi tidak hilang ia bertransformasi, menyesuaikan diri, dan tetap memengaruhi persepsi publik.

Tujuan akhir dari buku ini bukan memberikan jawaban final, melainkan membuka ruang refleksi. Pembaca diajak melihat bahwa politik tidak selalu sesederhana yang tampak. Ada lapisan-lapisan makna yang bekerja di balik keputusan, ada sistem kepercayaan yang membentuk cara pemimpin bertindak, dan ada budaya yang memengaruhi cara masyarakat menerima kekuasaan.

Dengan memahami rumusan masalah ini, buku ini berupaya mengajak pembaca keluar dari cara pandang yang sempit. Politik tidak cukup dibaca sebagai pertarungan kepentingan, dan klenik tidak cukup dipahami sebagai praktik irasional. Keduanya bertemu dalam ruang sosial yang sama, saling memengaruhi, dan membentuk dinamika yang tidak bisa dijelaskan dengan satu perspektif saja.

Pada akhirnya, tujuan penulisan ini adalah membangun kesadaran bahwa memahami politik berarti memahami manusia. Dan memahami manusia berarti berhadapan dengan rasionalitas sekaligus keyakinan, dengan logika sekaligus makna. Di sanalah kekuasaan bekerja tidak hanya melalui keputusan formal, tetapi juga melalui hal-hal yang sering tak terlihat, namun terus membentuk arah perjalanan sebuah bangsa.

1.5 Kerangka Pemikiran Buku

Buku ini berangkat dari satu premis dasar: politik tidak dapat dipahami hanya sebagai proses rasional yang berjalan melalui sistem formal. Ia selalu berada dalam ruang sosial yang dipenuhi makna, simbol, dan kepercayaan. Kekuasaan bukan hanya soal struktur, jabatan, dan kebijakan, tetapi juga soal bagaimana

masyarakat memaknai otoritas, bagaimana legitimasi dibangun, dan bagaimana figur pemimpin diterima secara kultural.

Kerangka pemikiran buku ini memandang klenik sebagai bagian dari budaya politik, bukan sekadar praktik individual yang berdiri terpisah dari sistem sosial. Dalam perspektif ini, klenik tidak ditempatkan sebagai kebenaran yang harus diyakini, juga bukan sebagai takhayul yang harus disingkirkan. Ia dilihat sebagai fenomena sosial yang memiliki fungsi simbolik membentuk persepsi, mempengaruhi legitimasi, dan dalam beberapa situasi ikut mewarnai proses pengambilan keputusan.

Pendekatan yang digunakan bertumpu pada pemahaman bahwa kekuasaan selalu bekerja dalam dua lapisan: lapisan formal dan lapisan kultural. Lapisan formal mencakup institusi negara, regulasi, sistem demokrasi, dan mekanisme administratif. Lapisan kultural mencakup nilai, keyakinan, simbol, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kedua lapisan ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan sering kali saling menegosiasikan peran.

Dalam kerangka ini, klenik ditempatkan sebagai bagian dari lapisan kultural yang membentuk cara masyarakat memahami kekuasaan. Ia hadir dalam narasi karisma, dalam simbol legitimasi, dalam ritual yang menyertai perjalanan politik, serta dalam cara publik memaknai keberhasilan dan kegagalan pemimpin. Ia tidak selalu terlihat, tetapi beroperasi melalui persepsi dan keyakinan kolektif.

Buku ini juga berpijak pada asumsi bahwa legitimasi adalah jantung kekuasaan. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya menjadi otoritas kosong. Legitimasi tidak lahir semata dari hukum atau prosedur, tetapi juga dari kepercayaan sosial. Kepercayaan sosial dibangun melalui pengalaman, narasi, simbol, dan interaksi antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks inilah praktik simbolik, termasuk yang sering disebut klenik, memiliki peran dalam memperkuat atau melemahkan legitimasi.

Kerangka pemikiran ini memadukan beberapa perspektif. Perspektif sejarah digunakan untuk melihat bagaimana praktik simbolik dan kepercayaan telah lama menjadi bagian dari struktur kekuasaan di Nusantara. Perspektif antropologi digunakan untuk memahami klenik sebagai sistem makna yang hidup dalam budaya. Perspektif sosiologi digunakan untuk membaca bagaimana kepercayaan membentuk relasi sosial dan persepsi publik. Perspektif politik digunakan untuk menelaah bagaimana semua itu berinteraksi dengan proses kekuasaan modern.

Melalui perpaduan ini, buku ini tidak melihat klenik sebagai fenomena statis. Ia dipahami sebagai sesuatu yang berubah mengikuti konteks zaman. Pada masa kerajaan, ia hadir dalam bentuk legitimasi sakral. Pada masa kolonial, ia menjadi simbol resistensi sekaligus identitas. Pada era modern, ia bertransformasi menjadi narasi karisma, simbol pencitraan, atau keyakinan personal yang mempengaruhi cara pemimpin bertindak.

Kerangka ini juga mengakui bahwa politik modern menuntut rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun pada saat yang sama, politik tidak pernah sepenuhnya steril dari dimensi simbolik. Pemimpin tetap manusia yang membawa nilai, kepercayaan, dan pengalaman batin. Masyarakat juga tidak selalu merespons kebijakan secara rasional; mereka merespons melalui emosi, identitas, dan keyakinan.

Di sinilah buku ini menempatkan fokusnya: pada titik pertemuan antara rasionalitas dan simbolisme. Pada ruang di mana kebijakan bertemu budaya. Pada situasi ketika keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh data, tetapi juga oleh makna yang hidup dalam masyarakat.

Kerangka pemikiran ini juga menyoroti risiko yang muncul dari relasi tersebut. Ketika simbol digunakan tanpa refleksi, ia bisa menjadi alat manipulasi. Ketika kepercayaan dimanfaatkan untuk membangun legitimasi semu, masyarakat kehilangan kemampuan kritis. Ketika klenik masuk ke ruang kebijakan tanpa kontrol rasional, potensi penyimpangan menjadi lebih besar.

Namun menolak sepenuhnya dimensi kultural juga berisiko. Politik yang sepenuhnya rasional tanpa memahami budaya akan kehilangan konteks sosialnya. Kebijakan yang benar secara teknis bisa gagal karena tidak selaras dengan nilai yang hidup di masyarakat. Kekuasaan yang mengabaikan makna kultural akan terasa asing dan sulit diterima.

Kerangka pemikiran buku ini mencoba menempatkan kedua sisi tersebut dalam posisi dialogis. Rasionalitas tidak ditolak, tetapi tidak dijadikan satu-satunya alat memahami politik. Tradisi tidak dipuja, tetapi juga tidak disederhanakan. Keduanya dilihat sebagai bagian dari dinamika yang membentuk cara kekuasaan bekerja.

Buku ini juga memandang politik sebagai proses yang tidak pernah netral. Setiap keputusan selalu membawa kepentingan, nilai, dan perspektif tertentu. Dalam proses itu, simbol dan kepercayaan sering digunakan untuk memperkuat posisi. Klenik, dalam beberapa situasi, menjadi bagian dari strategi simbolik baik sebagai keyakinan tulus maupun sebagai alat konstruksi citra.

Dengan kerangka ini, pembahasan dalam buku akan bergerak dari pemahaman konseptual menuju analisis empiris. Dari definisi menuju praktik. Dari sejarah menuju realitas kontemporer. Setiap bab dirancang untuk memperlihatkan bagaimana klenik hadir dalam berbagai lapisan: sebagai tradisi, sebagai identitas, sebagai narasi, dan sebagai faktor yang memengaruhi cara kekuasaan dijalankan.

Tujuan kerangka pemikiran ini bukan untuk menyimpulkan bahwa klenik menentukan politik, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak bisa diabaikan. Ia adalah bagian dari ekosistem makna yang membentuk cara masyarakat memahami kepemimpinan. Ia hadir sebagai variabel kultural yang sering tidak tercatat dalam analisis formal, tetapi memiliki dampak nyata.

Dengan memahami kerangka ini, pembaca diajak melihat politik Indonesia sebagai fenomena yang kompleks: modern sekaligus tradisional, rasional sekaligus simbolik, terbuka sekaligus

menyimpan lapisan makna yang tidak selalu terlihat. Di ruang kompleksitas itulah kekuasaan bekerja tidak hanya melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui simbol, kepercayaan, dan cara manusia memberi makna pada kepemimpinan.

Kerangka pemikiran buku ini akhirnya menempatkan satu kesadaran penting: memahami politik berarti memahami manusia dalam seluruh kompleksitasnya. Dan selama manusia masih hidup dalam jaringan makna, selama kepercayaan masih menjadi bagian dari kehidupan sosial, praktik simbolik termasuk yang disebut klenik akan tetap hadir dalam dinamika kekuasaan. Ia mungkin berubah bentuk, mungkin berganti bahasa, tetapi tidak pernah benar-benar hilang.

BAB II

MEMAHAMI KLENIK: KONSEP, ISTILAH, DAN PERSPEKTIF ILMIAH

2.1 Definisi Klenik dalam Perspektif Antropologi

Dalam percakapan sehari-hari, klenik sering dipahami secara sederhana: sesuatu yang mistis, tidak rasional, atau berkaitan dengan praktik gaib. Definisi seperti ini mudah dipahami, tetapi terlalu dangkal untuk menjelaskan kompleksitasnya. Antropologi ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks budaya memandang klenik bukan sekadar praktik aneh atau menyimpang, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif antropologi, setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk memahami dunia. Cara itu dibentuk oleh pengalaman sejarah, kondisi lingkungan, struktur sosial, dan sistem kepercayaan. Apa yang dianggap rasional di satu masyarakat belum tentu dianggap rasional di masyarakat lain. Sebaliknya, apa yang tampak irasional dari sudut pandang modern bisa memiliki fungsi sosial yang sangat jelas dalam konteks budaya tertentu.

Klenik, dalam kerangka ini, dapat dipahami sebagai praktik simbolik yang berkaitan dengan usaha manusia mengelola ketidakpastian. Ia hadir dalam bentuk ritual, kepercayaan terhadap tanda, penggunaan simbol, hingga keyakinan bahwa ada kekuatan tak kasatmata yang memengaruhi kehidupan. Bagi antropologi,

pertanyaan utamanya bukan “benar atau salah”, melainkan “apa fungsi sosialnya” dan “bagaimana ia dipahami oleh masyarakat yang mempraktikkannya”.

Pendekatan ini penting karena manusia tidak hanya hidup dalam dunia material, tetapi juga dalam dunia makna. Makna dibentuk melalui simbol. Ritual, misalnya, bukan sekadar tindakan tanpa tujuan. Ia adalah bahasa simbolik yang menghubungkan individu dengan komunitas, masa lalu, dan sistem kepercayaan yang lebih luas. Dalam banyak budaya, ritual berfungsi menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas, dan memberi rasa keteraturan di tengah ketidakpastian.

Antropologi melihat bahwa klenik sering kali berperan sebagai mekanisme interpretasi. Ketika sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi kegagalan, bencana, penyakit, atau bahkan keberhasilan masyarakat mencari kerangka makna. Klenik menyediakan kerangka itu. Ia memberi penjelasan, meskipun tidak selalu berbasis logika ilmiah. Penjelasan ini penting karena manusia membutuhkan narasi untuk memahami pengalaman hidupnya.

Dalam masyarakat tradisional, batas antara dunia fisik dan dunia nonfisik tidak selalu tegas. Alam, manusia, dan kekuatan tak kasatmata dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan. Dalam kerangka seperti itu, klenik bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan bagian dari cara hidup itu sendiri. Ia hadir dalam keputusan penting, dalam relasi sosial, dan dalam cara masyarakat memahami otoritas.

Antropologi juga menunjukkan bahwa praktik semacam ini tidak selalu bersifat individual. Ia bersifat kolektif. Klenik hidup karena didukung oleh sistem sosial: ada tokoh yang dipercaya, ada ritual yang diulang, ada narasi yang diwariskan. Ia menjadi bagian dari struktur budaya. Ketika satu generasi mewariskan keyakinan kepada generasi berikutnya, praktik itu tidak lagi sekadar kepercayaan personal, tetapi menjadi tradisi.

Di sinilah pentingnya melihat klenik sebagai fenomena budaya, bukan sekadar praktik mistis. Ia memiliki fungsi sosial: memperkuat solidaritas, memberi rasa aman, dan menjaga kontinuitas identitas. Bahkan dalam masyarakat modern, praktik simbolik tetap hidup. Ia mungkin berubah bentuk, menjadi lebih privat atau lebih halus, tetapi tidak hilang.

Antropologi juga mengingatkan bahwa istilah “klenik” sendiri adalah konstruksi sosial. Ia sering digunakan untuk memberi label pada praktik yang dianggap tidak rasional oleh perspektif dominan. Label ini bisa mengandung bias. Sesuatu yang disebut klenik oleh satu kelompok bisa dianggap spiritualitas oleh kelompok lain, atau tradisi oleh komunitas tertentu. Artinya, definisi klenik tidak pernah netral; ia selalu dipengaruhi oleh sudut pandang.

Dalam konteks Indonesia, definisi klenik menjadi semakin kompleks karena bertemu dengan keragaman budaya. Setiap daerah memiliki istilah, praktik, dan makna sendiri. Ada yang berkaitan dengan ritual adat, ada yang berhubungan dengan tokoh spiritual, ada pula yang terkait dengan simbol tertentu. Semua itu membentuk spektrum yang luas, sehingga klenik tidak bisa disederhanakan sebagai satu jenis praktik.

Perspektif antropologi membantu melihat bahwa praktik ini tidak berdiri di luar rasionalitas, tetapi memiliki rasionalitasnya sendiri rasionalitas kultural. Rasionalitas kultural berbeda dengan rasionalitas ilmiah. Ia tidak bergantung pada verifikasi empiris, tetapi pada konsensus sosial dan pengalaman kolektif. Selama masyarakat merasakan manfaat simbolik atau psikologis, praktik tersebut akan tetap dianggap bermakna.

Dalam banyak penelitian antropologi, praktik yang sering dilabeli klenik justru berfungsi sebagai alat menjaga keseimbangan sosial. Ritual dapat meredakan konflik, memperkuat kohesi, dan memberi ruang bagi ekspresi emosional. Dalam konteks ini, klenik bukan ancaman bagi masyarakat, tetapi bagian dari mekanisme sosial yang membuat kehidupan tetap berjalan.

Namun antropologi tidak menempatkan klenik sebagai sesuatu yang harus diterima tanpa kritik. Ia melihat praktik budaya sebagai fenomena dinamis yang selalu berinteraksi dengan perubahan zaman. Modernisasi, pendidikan, dan teknologi memengaruhi cara masyarakat memaknai kepercayaan. Praktik yang dulu dianggap sakral bisa berubah menjadi simbol identitas, bahkan menjadi komoditas budaya.

Di titik ini, klenik memasuki ruang baru: ruang sosial yang lebih kompleks. Ia tidak lagi hanya berkaitan dengan ritual tradisional, tetapi juga dengan representasi media, citra publik, dan bahkan politik. Ketika praktik simbolik digunakan untuk membangun legitimasi atau pengaruh, ia tidak lagi sekadar tradisi, tetapi menjadi bagian dari strategi sosial.

Antropologi memberi alat untuk membaca fenomena ini tanpa simplifikasi. Ia tidak menertawakan, tetapi juga tidak mengagungkan. Ia mencoba memahami bagaimana manusia membangun makna, bagaimana simbol bekerja, dan bagaimana kepercayaan memengaruhi tindakan. Pendekatan ini penting agar klenik tidak diperlakukan sebagai anomali, tetapi sebagai bagian dari dinamika budaya.

Definisi klenik dalam perspektif antropologi akhirnya tidak berhenti pada praktik mistis, tetapi mencakup keseluruhan sistem makna yang melingkupinya. Ia mencakup ritual, simbol, narasi, tokoh, dan pengalaman kolektif yang membentuk cara masyarakat memahami realitas. Ia hidup dalam bahasa, dalam ingatan, dan dalam tindakan sehari-hari.

Ketika klenik dibawa ke dalam pembahasan politik, perspektif ini menjadi semakin relevan. Politik adalah ruang simbolik. Ia penuh dengan narasi, gestur, dan konstruksi makna. Memahami klenik sebagai bagian dari sistem budaya membantu menjelaskan mengapa praktik simbolik sering hadir dalam perjalanan kekuasaan.

Antropologi tidak menjawab apakah klenik benar atau salah. Ia menjelaskan mengapa klenik ada, bagaimana ia bertahan, dan apa perannya dalam kehidupan sosial. Dari sudut pandang ini, klenik adalah cermin cara manusia menghadapi dunia yang tidak selalu pasti. Ia adalah upaya memberi makna pada pengalaman, menjaga identitas, dan mencari rasa keteraturan di tengah perubahan.

Dalam kerangka yang lebih luas, klenik memperlihatkan satu hal mendasar: manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk simbolik. Selama manusia masih membutuhkan simbol untuk memahami hidup, selama ketidakpastian masih menjadi bagian dari realitas, praktik semacam ini akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Ia mungkin berubah bahasa, mungkin berganti medium, tetapi tetap menjadi bagian dari cara manusia memberi makna pada dunia yang mereka jalani.

2.2 Perbedaan Klenik, Mistisisme, dan Spiritualitas

Istilah klenik, mistisisme, dan spiritualitas sering dipakai secara bergantian dalam percakapan publik, seolah-olah menunjuk pada hal yang sama. Padahal, dalam kajian sosial dan budaya, ketiganya memiliki ruang makna yang berbeda. Menyamakan ketiganya bukan hanya menyederhanakan, tetapi juga berisiko menyesatkan cara memahami relasi manusia dengan kepercayaan, pengalaman batin, dan praktik simbolik.

Klenik, dalam konteks sosial Indonesia, lebih dekat pada praktik yang bersifat instrumental. Ia berkaitan dengan usaha memengaruhi realitas melalui cara-cara yang diyakini memiliki kekuatan tak kasatmata. Praktiknya bisa berupa ritual tertentu, penggunaan simbol, kepercayaan terhadap tanda, atau tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil konkret: keberuntungan, perlindungan, kemenangan, atau legitimasi. Fokusnya bukan pada pengalaman batin, melainkan pada efek yang diharapkan.

Mistisisme berbeda. Ia tidak berorientasi pada hasil praktis, melainkan pada pengalaman langsung dengan dimensi yang dianggap melampaui realitas sehari-hari. Mistisisme adalah upaya memahami makna hidup, keberadaan, dan hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih besar Tuhan, kosmos, atau realitas transenden. Dalam mistisisme, yang dicari bukan keberhasilan duniawi, tetapi pemahaman batin. Pengalaman ini sering bersifat personal, sunyi, dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan bahasa.

Spiritualitas berada di ruang yang lebih luas. Ia tidak selalu terkait dengan ritual tertentu atau pengalaman mistik yang ekstrem. Spiritualitas lebih berkaitan dengan kesadaran nilai, makna hidup, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri, orang lain, serta sesuatu yang dianggap suci. Ia bisa hadir dalam praktik agama, tetapi juga bisa muncul di luar institusi formal. Spiritualitas tidak selalu membutuhkan simbol atau ritual khusus; ia bisa hadir dalam tindakan sederhana yang berangkat dari kesadaran moral.

Perbedaan ini penting karena masing-masing memiliki orientasi yang berbeda. Klenik berorientasi pada pengaruh terhadap realitas eksternal. Mistisisme berorientasi pada pengalaman batin yang mendalam. Spiritualitas berorientasi pada makna hidup dan kesadaran nilai. Ketiganya bisa saling bersinggungan, tetapi tidak identik.

Dalam konteks sosial Indonesia, ketiganya sering bercampur. Seseorang bisa menjalankan praktik klenik sambil mengaku spiritual. Seseorang bisa memiliki pengalaman mistik dan sekaligus terlibat dalam ritual tradisional. Batasnya tidak selalu tegas, karena budaya tidak bekerja dengan definisi akademik yang kaku. Namun percampuran ini justru menunjukkan bahwa masyarakat memaknai kepercayaan secara berlapis.

Klenik sering kali dipraktikkan dalam situasi yang berkaitan dengan kepentingan konkret. Ketika seseorang menghadapi kompetisi, ketidakpastian, atau ancaman, praktik ini muncul sebagai cara memperoleh rasa aman atau kontrol. Mistisisme,

sebaliknya, lebih sering lahir dari pencarian makna, dari keinginan memahami hidup secara lebih dalam. Spiritualitas hadir sebagai kerangka etis yang membimbing tindakan.

Masalah muncul ketika ketiganya disamakan. Praktik yang sebenarnya instrumental bisa diberi label spiritual, padahal orientasinya berbeda. Pengalaman mistik bisa dianggap klenik, padahal tidak berkaitan dengan manipulasi realitas. Spiritualitas bisa direduksi menjadi ritual simbolik, padahal esensinya adalah kesadaran nilai.

Dalam politik, perbedaan ini menjadi semakin penting. Klenik sering masuk sebagai alat untuk membangun citra, alat memperkuat legitimasi, atau alat mengelola persepsi. Mistisisme jarang muncul dalam bentuk terbuka, karena sifatnya personal. Spiritualitas, di sisi lain, sering dijadikan bahasa moral untuk membangun kepercayaan publik.

Seorang pemimpin bisa menampilkan citra spiritual untuk menunjukkan integritas. Ia bisa menceritakan perjalanan batin, kedekatan dengan nilai moral, atau komitmen terhadap keadilan. Itu berbeda dengan praktik klenik yang bersifat strategis dan sering dilakukan di ruang privat. Perbedaan ini penting agar publik tidak keliru membaca mana keyakinan personal, mana konstruksi citra, dan mana strategi simbolik.

Antropologi melihat ketiga istilah ini sebagai bagian dari spektrum pengalaman manusia. Tidak ada satu pun yang sepenuhnya berdiri sendiri. Dalam masyarakat tradisional, spiritualitas sering menyatu dengan ritual. Mistisisme hadir dalam praktik keagamaan. Klenik muncul dalam bentuk tradisi lokal. Semua itu membentuk lanskap kepercayaan yang kompleks.

Namun kompleksitas ini tidak berarti semuanya sama. Ada perbedaan mendasar pada orientasi. Klenik berusaha memengaruhi dunia. Mistisisme berusaha memahami dunia. Spiritualitas berusaha memberi makna pada hidup di dalam dunia.

Tiga orientasi ini menghasilkan praktik, bahasa, dan dampak yang berbeda.

Dalam masyarakat modern, perbedaan ini semakin kabur. Media, budaya populer, dan narasi publik sering mencampurkan istilah-istilah tersebut. Figur yang memiliki karisma disebut spiritual, pengalaman personal disebut mistik, praktik simbolik disebut klenik. Pencampuran ini membuat diskusi menjadi tidak jernih.

Memisahkan ketiganya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Ketika praktik klenik masuk ke ruang politik, ia membawa implikasi yang berbeda dibanding spiritualitas. Ia bisa menjadi alat pengaruh. Ketika spiritualitas masuk ke ruang publik, ia membawa dimensi moral. Ia bisa memperkuat integritas. Mistisisme, karena sifatnya personal, jarang menjadi alat politik secara langsung, tetapi bisa membentuk karakter pemimpin.

Perbedaan ini juga membantu melihat batas antara keyakinan dan manipulasi. Keyakinan spiritual bersifat reflektif dan berorientasi pada nilai. Mistisisme bersifat personal dan tidak selalu ingin dipertontonkan. Klenik, ketika menjadi instrumen, berpotensi digunakan secara strategis untuk memengaruhi persepsi.

Dalam kerangka budaya Indonesia, ketiganya hidup berdampingan. Masyarakat tidak selalu memisahkan secara tegas. Seseorang bisa menggabungkan praktik ritual, pencarian batin, dan nilai moral dalam satu pengalaman. Bagi masyarakat, semua itu bagian dari kehidupan. Namun bagi analisis sosial, pembedaan ini penting agar fenomena dapat dibaca secara lebih akurat.

Memahami perbedaan ini membantu melihat bahwa tidak semua yang bersifat non-rasional memiliki fungsi yang sama. Ada yang menjadi alat, ada yang menjadi pengalaman, ada yang menjadi nilai. Ketika semuanya disatukan dalam satu label, maknanya hilang.

Pada akhirnya, klenik, mistisisme, dan spiritualitas adalah tiga cara manusia berhubungan dengan ketidakpastian hidup. Klenik mencoba mengendalikan, mistisisme mencoba memahami, spiritualitas mencoba memaknai. Tiga jalur ini menunjukkan

bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya hidup dalam logika. Ia selalu mencari sesuatu yang lebih sesuatu yang memberi rasa keterhubungan, rasa aman, dan rasa makna. Dan dari pencarian itulah berbagai praktik lahir, berkembang, dan terus menjadi bagian dari cara manusia menjalani kehidupan sosialnya.

2.3 Klenik sebagai Sistem Pengetahuan Tradisional

Dalam banyak perbincangan modern, klenik sering diposisikan sebagai kebalikan dari pengetahuan. Ia dianggap tidak ilmiah, tidak rasional, bahkan sering dilekatkan dengan label takhayul. Cara pandang seperti ini lahir dari kerangka berpikir modern yang menempatkan sains sebagai satu-satunya rujukan legitim pengetahuan. Namun dalam perspektif antropologi dan sejarah kebudayaan, klenik justru dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pengetahuan tradisional sebuah cara masyarakat membaca realitas, memahami risiko, dan mengelola kehidupan jauh sebelum metode ilmiah dikenal.

Setiap masyarakat membangun pengetahuan dari pengalaman. Pengetahuan itu tidak selalu ditulis, tetapi diwariskan melalui praktik, cerita, simbol, dan kebiasaan. Dalam konteks Nusantara, pengetahuan tradisional berkembang dari interaksi panjang antara manusia dan lingkungan. Masyarakat belajar dari alam, dari peristiwa, dari kegagalan, dari keberhasilan. Pengalaman ini membentuk pola keyakinan tentang sebab-akibat, tentang tanda, dan tentang makna.

Klenik lahir dari proses ini. Ia bukan sekadar ritual tanpa dasar, tetapi bagian dari cara masyarakat memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Ketika sebuah tindakan diyakini membawa keberuntungan atau malapetaka, keyakinan itu biasanya berakar dari pengalaman kolektif yang diulang dan diwariskan. Ia menjadi semacam “arsip sosial” yang hidup dalam ingatan masyarakat.

Pengetahuan tradisional tidak selalu disusun dalam bentuk teori. Ia hadir dalam praktik. Cara memilih waktu, cara membaca situasi, cara memahami tanda-tanda tertentu semuanya merupakan bentuk pengetahuan. Dalam masyarakat agraris, misalnya, banyak keputusan penting diambil berdasarkan pengamatan terhadap pola alam yang kemudian diberi makna simbolik. Makna simbolik ini lama-kelamaan membentuk sistem keyakinan yang diwariskan lintas generasi.

Di sinilah klenik berfungsi sebagai sistem interpretasi. Ia menyediakan kerangka untuk memahami peristiwa yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Ketika kegagalan terjadi, ketika keberhasilan datang, ketika situasi berubah drastis, klenik memberi narasi. Narasi ini tidak selalu logis menurut standar ilmiah, tetapi memberi rasa keteraturan. Ia membantu manusia merasa bahwa dunia masih bisa dipahami, bahwa hidup tidak sepenuhnya acak.

Pengetahuan semacam ini tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh struktur sosial: ada tokoh yang dipercaya, ada praktik yang diulang, ada nilai yang dijaga. Tokoh-tokoh ini sering berperan sebagai penjaga pengetahuan, penerjemah simbol, atau mediator antara pengalaman individu dan makna kolektif. Dalam masyarakat tradisional, mereka memiliki posisi penting karena menjadi sumber rujukan dalam situasi ketidakpastian.

Modernisasi memang mengubah cara pengetahuan diproduksi. Sains menghadirkan metode yang sistematis, terukur, dan dapat diverifikasi. Namun kehadiran sains tidak serta-merta menghapus pengetahuan tradisional. Keduanya sering hidup berdampingan. Seseorang bisa menggunakan teknologi modern, tetapi tetap memegang kepercayaan tertentu dalam mengambil keputusan penting. Ini bukan kontradiksi, melainkan refleksi dari kompleksitas cara manusia berpikir.

Klenik sebagai sistem pengetahuan tradisional bekerja pada level makna. Ia tidak berfungsi untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, tetapi untuk memberi kerangka interpretasi sosial. Ia

menjawab pertanyaan yang tidak selalu dijawab oleh sains: mengapa sesuatu terjadi, bagaimana manusia harus bersikap, dan bagaimana menghadapi ketidakpastian.

Dalam konteks budaya, klenik juga berfungsi sebagai alat menjaga kontinuitas. Ia menghubungkan generasi. Ketika satu generasi mewariskan praktik kepada generasi berikutnya, yang diwariskan bukan hanya ritual, tetapi juga cara melihat dunia. Cara melihat dunia ini membentuk identitas. Ia membuat masyarakat merasa memiliki akar, memiliki sejarah, dan memiliki cara sendiri memahami realitas.

Namun melihat klenik sebagai pengetahuan tradisional tidak berarti menempatkannya setara dengan sains. Keduanya bekerja dalam kerangka yang berbeda. Sains mencari kebenaran universal melalui metode verifikasi. Pengetahuan tradisional mencari makna melalui pengalaman kolektif. Sains menuntut bukti empiris. Pengetahuan tradisional bertumpu pada konsensus sosial dan pengalaman yang diwariskan.

Ketika keduanya dipertentangkan secara ekstrem, yang terjadi adalah simplifikasi. Menganggap klenik sepenuhnya tidak bernilai mengabaikan fungsi sosialnya. Menganggapnya sebagai kebenaran mutlak juga berisiko menutup ruang kritik. Yang lebih penting adalah memahami posisinya: sebagai sistem pengetahuan yang bekerja di ruang budaya.

Dalam politik, klenik sebagai pengetahuan tradisional sering hadir dalam bentuk yang tidak langsung. Ia memengaruhi cara orang membaca situasi, cara memaknai legitimasi, dan cara menilai pemimpin. Narasi tentang karisma, tentang “tanda-tanda”, atau tentang figur yang dianggap memiliki daya tertentu adalah bagian dari sistem makna yang dibentuk oleh pengetahuan tradisional.

Klenik juga memperlihatkan bagaimana pengetahuan tidak selalu netral. Ia terkait dengan kekuasaan. Siapa yang dianggap tahu, siapa yang dipercaya, dan siapa yang memiliki otoritas simbolik adalah bagian dari struktur sosial. Pengetahuan tradisional

memberi legitimasi pada figur tertentu, dan legitimasi ini bisa berpengaruh pada dinamika sosial.

Perubahan zaman memaksa pengetahuan tradisional beradaptasi. Praktik yang dulu bersifat kolektif kini sering menjadi lebih privat. Narasi yang dulu diwariskan lisan kini menyebar melalui media digital. Bentuknya berubah, tetapi fungsinya tetap: memberi makna, memberi rasa kontrol, dan menjaga kontinuitas identitas.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan klenik sebagai pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan satu sumber pengetahuan. Mereka hidup dalam pluralitas: sains, agama, tradisi, pengalaman. Semua itu membentuk cara berpikir yang berlapis. Keputusan tidak selalu diambil dari satu logika, tetapi dari pertemuan berbagai logika.

Memahami klenik sebagai sistem pengetahuan tradisional membantu melihat bahwa praktik tersebut bukan sekadar sisa masa lalu. Ia adalah bagian dari cara masyarakat beradaptasi dengan dunia yang tidak selalu pasti. Ia memberi kerangka ketika data tidak cukup, memberi makna ketika logika tidak menjawab, dan memberi rasa keterhubungan ketika perubahan terasa terlalu cepat.

Dalam kerangka ini, klenik tidak dipahami sebagai lawan modernitas, tetapi sebagai bagian dari perjalanan budaya. Ia menunjukkan bahwa manusia selalu mencari cara memahami dunia baik melalui sains, melalui agama, maupun melalui simbol. Semua itu adalah upaya manusia menghadapi keterbatasannya.

Pada akhirnya, melihat klenik sebagai pengetahuan tradisional berarti melihat manusia dalam konteks sejarahnya. Manusia tidak pernah memulai dari nol. Ia selalu membawa warisan makna. Warisan itu bisa berubah, bisa dipertanyakan, bisa ditafsir ulang, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih hidup dalam budaya, selama pengalaman kolektif masih diwariskan, sistem pengetahuan tradisional termasuk yang disebut

klenik akan terus menjadi bagian dari cara manusia memahami dunia dan dirinya sendiri.

2.4 Rasionalitas dan Irasionalitas dalam Praktik Sosial

Gagasan bahwa manusia adalah makhluk rasional sudah lama menjadi fondasi pemikiran modern. Ilmu ekonomi, politik, dan kebijakan publik dibangun di atas asumsi bahwa individu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan logis: untung-rugi, risiko-manfaat, efisiensi-hasil. Namun realitas sosial memperlihatkan sesuatu yang lebih rumit. Manusia memang mampu berpikir rasional, tetapi jarang hidup sepenuhnya rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan sering lahir dari campuran logika, emosi, kebiasaan, simbol, dan keyakinan.

Praktik sosial adalah cermin dari campuran itu. Dalam masyarakat, rasionalitas tidak selalu menjadi satu-satunya alat memahami realitas. Ada pengalaman, ada intuisi, ada tradisi, ada narasi yang diwariskan. Semua itu membentuk cara manusia bertindak. Sesuatu yang tampak irasional dari sudut pandang ilmiah bisa memiliki rasionalitasnya sendiri dalam konteks budaya.

Rasionalitas ilmiah bekerja dengan prinsip sebab-akibat yang dapat diuji. Ia membutuhkan bukti, data, dan metode. Irasionalitas, dalam pengertian sosial, tidak selalu berarti tanpa logika. Ia sering merujuk pada tindakan yang tidak mengikuti standar ilmiah, tetapi tetap memiliki makna bagi pelakunya. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut justru berfungsi menjaga stabilitas psikologis dan sosial.

Ambil contoh sederhana: seseorang memilih waktu tertentu untuk memulai usaha karena merasa “lebih baik”. Secara ilmiah, keputusan itu mungkin tidak memiliki dasar. Namun secara psikologis, keputusan tersebut memberi rasa percaya diri. Rasa percaya diri memengaruhi tindakan, dan tindakan memengaruhi hasil. Dalam konteks ini, yang tampak irasional justru menghasilkan efek sosial yang nyata.

Praktik sosial selalu berada di antara dua kutub ini. Rasionalitas diperlukan untuk merancang sistem, membuat kebijakan, dan menyelesaikan masalah teknis. Irasionalitas atau lebih tepatnya, non-rasionalitas muncul dalam cara manusia memberi makna. Ia hadir dalam tradisi, simbol, dan keyakinan yang tidak selalu dapat dijelaskan, tetapi terus dijalankan karena dianggap penting.

Dalam masyarakat Indonesia, pertemuan antara rasionalitas dan irasionalitas terlihat jelas. Modernisasi membawa pendidikan, teknologi, dan metode ilmiah. Namun tradisi tidak hilang. Praktik simbolik tetap hidup, bahkan sering beradaptasi dengan konteks baru. Seseorang bisa sangat rasional dalam pekerjaan, tetapi tetap memegang kepercayaan tertentu dalam kehidupan personal. Kontradiksi ini bukan kegagalan, melainkan bagian dari dinamika sosial.

Klenik berada di wilayah ini. Ia sering dianggap irasional karena tidak mengikuti standar ilmiah. Namun bagi pelakunya, ia memiliki logika. Logika itu bukan logika eksperimen, melainkan logika pengalaman dan makna. Selama praktik tersebut memberi rasa aman atau keyakinan, ia akan terus dijalankan. Rasionalitas ilmiah tidak selalu mampu menggantikan fungsi psikologis dan simbolik ini.

Dalam politik, relasi ini menjadi lebih kompleks. Politik menuntut rasionalitas perencanaan, data, strategi, dan kebijakan. Namun politik juga bergantung pada persepsi, emosi, dan simbol. Keputusan politik tidak hanya diukur dari efektivitasnya, tetapi juga dari bagaimana ia diterima oleh masyarakat. Di sinilah non-rasionalitas memainkan peran.

Seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang sangat rasional secara teknis, tetapi gagal karena tidak mempertimbangkan nilai dan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, keputusan yang secara teknis sederhana bisa diterima luas karena selaras dengan persepsi publik. Rasionalitas tanpa konteks sosial sering kehilangan daya. Non-rasionalitas tanpa kontrol rasional berisiko menyesatkan. Politik bergerak di antara keduanya.

Ilmu sosial modern sebenarnya tidak lagi melihat rasionalitas sebagai sesuatu yang tunggal. Ada rasionalitas instrumental yang berfokus pada hasil dan efisiensi. Ada rasionalitas nilai yang berfokus pada makna dan prinsip. Ada pula rasionalitas kultural yang terbentuk dari kebiasaan dan tradisi. Dalam praktik sosial, ketiganya saling berinteraksi.

Ketika seseorang menjalankan ritual tertentu sebelum mengambil keputusan, tindakan itu mungkin tidak rasional secara ilmiah, tetapi rasional secara kultural. Ia mengikuti sistem makna yang hidup dalam masyarakatnya. Rasionalitas kultural ini membuat praktik sosial tetap berjalan, bahkan ketika logika modern tidak selalu sejalan.

Masalah muncul ketika irasionalitas menjadi satu-satunya dasar tindakan. Ketika keputusan penting diambil tanpa pertimbangan rasional, risiko kesalahan meningkat. Dalam ruang publik, hal ini bisa berdampak luas. Kebijakan yang lahir dari keyakinan semata tanpa analisis dapat merugikan masyarakat. Di sinilah pentingnya keseimbangan.

Sebaliknya, menolak sepenuhnya dimensi non-rasional juga bermasalah. Manusia bukan mesin. Ia membutuhkan makna, simbol, dan rasa keterhubungan. Rasionalitas yang terlalu kaku bisa mengabaikan aspek kemanusiaan. Sistem yang sepenuhnya teknokratis sering gagal memahami kebutuhan emosional dan kultural masyarakat.

Praktik sosial menunjukkan bahwa rasionalitas dan irasionalitas bukan dua dunia yang terpisah, melainkan dua cara manusia merespons realitas. Dalam banyak situasi, keduanya bekerja bersama. Rasionalitas memberi arah, non-rasionalitas memberi makna. Rasionalitas menyusun strategi, non-rasionalitas membangun keyakinan.

Klenik, dalam konteks ini, menjadi contoh bagaimana praktik non-rasional bertahan. Ia tidak selalu kuat secara logika ilmiah, tetapi kuat secara simbolik. Ia memberi rasa bahwa hidup memiliki pola,

bahwa tindakan memiliki makna, bahwa manusia tidak sepenuhnya sendirian menghadapi ketidakpastian. Fungsi ini membuatnya sulit dihapus.

Perubahan zaman memang mendorong rasionalisasi. Pendidikan, teknologi, dan akses informasi memperluas cara berpikir ilmiah. Namun rasionalisasi tidak otomatis menghapus praktik non-rasional. Ia justru sering memunculkan bentuk baru. Praktik simbolik berpindah medium, narasi berubah bahasa, tetapi kebutuhan akan makna tetap ada.

Dalam masyarakat modern, irasionalitas tidak selalu muncul sebagai ritual tradisional. Ia bisa hadir dalam bentuk kepercayaan populer, mitos digital, atau narasi karisma yang dibangun melalui media. Bentuknya berubah, tetapi strukturnya sama: manusia mencari pola dan makna di balik peristiwa.

Memahami relasi ini membantu melihat bahwa praktik sosial tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu logika. Ia adalah hasil interaksi antara akal, emosi, dan budaya. Ketika ketiganya selaras, masyarakat bergerak stabil. Ketika salah satunya mendominasi secara ekstrem, muncul ketidakseimbangan.

Pada akhirnya, rasionalitas dan irasionalitas adalah bagian dari cara manusia menjadi manusia. Rasionalitas membuat manusia mampu merencanakan. Irasionalitas atau sisi non-rasional membuat manusia mampu berharap, percaya, dan memberi makna. Tanpa rasionalitas, hidup kehilangan arah. Tanpa makna, hidup kehilangan kedalaman.

Praktik sosial selalu bergerak di antara dua kutub ini. Ia tidak pernah sepenuhnya rasional, tetapi juga tidak sepenuhnya irasional. Ia adalah ruang negosiasi, ruang kompromi, ruang di mana manusia mencoba menata hidup dengan segala keterbatasannya. Dan selama manusia masih hidup dalam ketidakpastian, selama makna masih dicari, relasi antara rasionalitas dan irasionalitas akan terus menjadi bagian dari

dinamika sosial termasuk dalam cara kekuasaan dipahami dan dijalankan.

2.5 Kritik Akademik terhadap Praktik Klenik

Setiap praktik sosial yang bertahan lama hampir selalu memiliki dua sisi: fungsi dan problem. Klenik, sebagai bagian dari budaya, tidak luput dari kritik. Dunia akademik terutama ilmu sosial, psikologi, dan filsafat telah lama menaruh perhatian pada praktik-praktik yang dianggap non-rasional, bukan untuk menertawakan atau menolak secara emosional, tetapi untuk memahami dampaknya terhadap cara manusia berpikir, bertindak, dan membangun struktur sosial.

Kritik akademik pertama berangkat dari persoalan rasionalitas. Ilmu pengetahuan modern dibangun di atas metode verifikasi: sebuah klaim harus dapat diuji, diulang, dan dibuktikan secara empiris. Praktik klenik, yang sering bertumpu pada pengalaman subjektif dan simbol, sulit memenuhi standar ini. Ia tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, sehingga kebenarannya tidak dapat dipastikan dalam kerangka sains. Dari sudut pandang ini, klenik dipandang problematis ketika dijadikan dasar pengambilan keputusan yang berdampak luas.

Namun kritik tidak berhenti pada soal metode. Ilmu sosial juga melihat bahwa praktik klenik berpotensi membentuk pola pikir yang tidak kritis. Ketika peristiwa selalu dijelaskan melalui kekuatan tak kasatmata, ruang untuk analisis rasional menjadi sempit. Penyebab konkret ekonomi, sosial, struktural bisa terabaikan. Dalam situasi tertentu, hal ini membuat masyarakat sulit mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.

Psikologi memberikan kritik yang berbeda. Praktik klenik sering dilihat sebagai mekanisme coping cara manusia mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Dalam batas tertentu, mekanisme ini tidak berbahaya. Ia memberi rasa aman dan kontrol. Namun ketika ketergantungan terlalu besar, individu bisa kehilangan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Keyakinan

terhadap faktor eksternal menjadi dominan, sementara tanggung jawab personal melemah.

Dalam konteks politik, kritik menjadi lebih tajam. Akademisi menyoroti potensi manipulasi simbolik. Klenik bisa digunakan sebagai alat membangun legitimasi semu. Figur publik dapat memanfaatkan simbol, ritual, atau narasi mistis untuk membentuk citra karismatik tanpa harus menunjukkan kapasitas nyata. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berisiko menilai pemimpin berdasarkan persepsi simbolik, bukan kompetensi.

Sosiologi juga menyoroti dimensi kekuasaan dalam praktik klenik. Siapa yang dianggap memiliki “pengetahuan” atau “daya” tertentu sering mendapatkan posisi sosial yang kuat. Posisi ini dapat menciptakan hierarki. Dalam beberapa kasus, otoritas simbolik tersebut digunakan untuk memengaruhi keputusan kolektif. Kritik akademik melihat bahwa relasi semacam ini bisa membuka ruang dominasi, bahkan eksploitasi.

Kritik lain muncul dari perspektif etika. Ketika praktik klenik masuk ke ruang publik terutama kebijakan muncul pertanyaan tentang tanggung jawab. Kebijakan publik seharusnya didasarkan pada analisis rasional dan pertimbangan objektif. Jika keyakinan personal menjadi faktor utama, risiko ketidakadilan meningkat. Keputusan yang memengaruhi banyak orang tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya melalui keyakinan subjektif.

Filsafat ilmu menambahkan dimensi lain: persoalan kebenaran. Dalam kerangka filsafat, pengetahuan tidak hanya dinilai dari fungsinya, tetapi juga dari validitasnya. Klenik mungkin memiliki fungsi sosial, tetapi tidak otomatis memiliki kebenaran epistemologis. Artinya, sesuatu bisa bermakna tanpa harus benar secara ilmiah. Pembedaan ini penting agar praktik budaya tidak secara otomatis dianggap sebagai sumber pengetahuan yang setara dengan sains.

Namun kritik akademik tidak sepenuhnya menolak keberadaan klenik. Banyak ilmuwan sosial justru melihatnya sebagai fenomena

yang harus dipahami, bukan dihapus. Menghapus praktik simbolik secara paksa justru berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Budaya tidak bekerja dengan logika perintah. Ia berubah melalui proses, dialog, dan reinterpretasi.

Pendekatan yang lebih konstruktif melihat klenik sebagai bagian dari pengalaman manusia yang perlu ditempatkan secara proporsional. Ia bisa memiliki fungsi psikologis, identitas kultural, dan nilai simbolik. Namun fungsi tersebut tidak boleh menggantikan rasionalitas ketika berhadapan dengan persoalan publik. Di sinilah garis kritis dibangun: antara menghormati budaya dan menjaga akal sehat kolektif.

Dalam masyarakat modern, kritik akademik juga diarahkan pada bentuk baru klenik. Ia tidak lagi hanya hadir dalam ritual tradisional, tetapi juga dalam narasi populer, teori konspirasi, dan mitos digital. Kepercayaan terhadap informasi yang tidak diverifikasi menunjukkan bahwa kecenderungan non-rasional tidak hilang, hanya berganti medium. Kritik ini mengingatkan bahwa rasionalitas perlu terus dirawat melalui pendidikan dan literasi.

Kritik akademik juga menyentuh aspek ekonomi. Praktik klenik, dalam beberapa kasus, menjadi komoditas. Ia dipasarkan, dijual, dan dimanfaatkan untuk keuntungan. Ketika keyakinan berubah menjadi industri, muncul persoalan etis tentang eksploitasi. Masyarakat yang rentan bisa menjadi target. Di titik ini, klenik tidak lagi sekadar tradisi, tetapi masuk ke dalam mekanisme pasar.

Namun, menariknya, dunia akademik juga mengkritik pendekatan yang terlalu simplistik terhadap klenik. Menganggapnya semata sebagai irasionalitas adalah reduksi. Praktik budaya selalu memiliki konteks. Ia tidak muncul tanpa sebab. Kritik yang terlalu keras tanpa pemahaman justru berpotensi memutus dialog antara ilmu dan masyarakat.

Ilmu sosial modern lebih memilih pendekatan reflektif. Ia mengakui bahwa manusia tidak selalu rasional, tetapi tetap

menekankan pentingnya berpikir kritis. Ia memahami bahwa simbol memiliki fungsi, tetapi juga menegaskan bahwa simbol bisa disalahgunakan. Ia melihat bahwa kepercayaan memberi makna, tetapi juga dapat menutup ruang pertanyaan.

Dalam konteks Indonesia, kritik akademik terhadap klenik tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial. Negara ini dibangun di atas keragaman budaya. Praktik simbolik adalah bagian dari identitas. Namun di saat yang sama, negara modern membutuhkan rasionalitas untuk menjalankan sistem. Ketegangan antara keduanya tidak bisa dihindari.

Kritik akademik mencoba menjaga keseimbangan itu. Ia tidak menghapus tradisi, tetapi mengingatkan batasnya. Ia tidak menolak keyakinan, tetapi mempertanyakan dampaknya. Ia tidak menertawakan praktik simbolik, tetapi menguji klaimnya. Pendekatan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada dua ekstrem: rasionalitas yang kering atau kepercayaan yang tak teruji.

Pada akhirnya, kritik terhadap klenik bukan semata soal benar atau salah. Ia soal tanggung jawab. Bagaimana praktik budaya ditempatkan dalam kehidupan sosial. Bagaimana keyakinan personal tidak mengganggu kepentingan publik. Bagaimana simbol tidak menggantikan analisis. Dan bagaimana masyarakat tetap memiliki kemampuan berpikir kritis di tengah tradisi yang kuat.

Ilmu pengetahuan tidak hadir untuk menghapus makna, tetapi untuk menjaga kejernihan. Ia mengingatkan bahwa dunia bisa dipahami melalui banyak cara, tetapi tidak semua cara memiliki dampak yang sama. Dalam ruang pribadi, manusia bebas mencari makna. Dalam ruang publik, tanggung jawab kolektif menuntut rasionalitas.

Di situlah kritik akademik menemukan relevansinya: bukan sebagai penolak budaya, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap praktik termasuk klenik harus terus dibaca ulang, dipertanyakan, dan ditempatkan secara sadar dalam kehidupan sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Durkheim, E. (1912/2001). *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- Haryatmoko. (2016). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

PROFIL PENULIS



Tri Siswanti lahir di Kabupaten Temanggung tanggal 9 April 1979. Menempuh pendidikan dasar di SD Remaja (1986-1991), dan di SMP Remaja Kota Parakan (1992-1994). Pendidikan menengah di SPK Ngesti Waluyo Kota Parakan (1995-1997). Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangka

Raya (2008-2011) mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara (M.A.P). Pada Oktober 2006, penulis mengabdikan dirinya bekerja di Polda Kalimantan Tengah sekaligus pada tahun menjabat Kepala Urusan Perencanaan dan Administrasi Staf Pribadi Pimpinan. Pada tahun 2017 serta dipercaya menjadi *Instructor Counter Messaging Course* oleh *INTERNASIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE TRAINING ASSISTANCE PROGRAM US Departement Of Justice*.

Di tengah kesibukannya sebagai PNS Polri, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan (September, 2011–19 Juni 2013) dengan mengambil program studi Magister Administrasi Publik (M.A.P). Penulis telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya (S3) pada Program Studi Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Malang (2020) dengan predikat cumlaude.

Selain bertugas di Polda Kalimantan Tengah, penulis mengajar di Universitas Negeri Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Penulis mengampu mata kuliah Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Politik, dengan penekanan utamanya pada motivasi internalisasi Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Publik. Aktivitasnya ini dilakukan pada beberapa kegiatan Kuliah Praktek Lapangan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pada pertengahan-akhir 2019, penulis dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Kasubbagsisinfo) Bagian Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kalimantan Tengah. Di sela-sela kesibukannya, sosok yang konsisten ini aktif dalam bidang tulis-menulis. Hal ini, salah satunya, karena didukung keterampilannya mengetik sepuluh jari secara cepat dan tepat. Salah satu karya yang pernah diterbitkan adalah artikel berjudul "*Normalization of Dream State Police Stigma*" (Jurnal Palangka Raya, 2019).

Pada tahun 2024 penulis dipercaya menjabat sebagai Gadik Madya Polda Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang, serta Kembali membuat buku-buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hak_cipta@trisa.wanto1.com.

Politik sering dipahami sebagai arena rasional yang digerakkan oleh strategi, kepentingan, dan kalkulasi kekuasaan. Namun dalam realitas Indonesia, keputusan politik tidak selalu lahir dari ruang-ruang formal dan logika teknokratis semata. Ada wilayah lain yang bekerja secara senyap: kepercayaan, simbol, ritual, dan praktik klenik yang berakar kuat dalam budaya masyarakat.

Buku *Ritual di Balik Keputusan: Klenik sebagai Budaya Politik* mengajak pembaca menelusuri sisi yang jarang dibicarakan dari dunia kepemimpinan dan kekuasaan. Klenik tidak ditempatkan sebagai fenomena sensasional, melainkan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang membentuk cara pandang pemimpin, elite politik, dan masyarakat. Dalam banyak situasi, praktik ini berfungsi sebagai sumber legitimasi, alat pencitraan, bahkan strategi psikologis dalam pengambilan keputusan.

Melalui pendekatan historis, antropologis, dan politik, buku ini membahas bagaimana praktik mistis hadir sejak era kerajaan, bertahan di masa kolonial, hingga beradaptasi dalam sistem politik modern. Pembaca diajak melihat bagaimana ritual, simbol, dan narasi karisma digunakan untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat otoritas, serta mempengaruhi arah kebijakan.

Di sisi lain, buku ini juga mengupas risiko yang muncul ketika klenik bersinggungan dengan kekuasaan: manipulasi, pembenaran kebijakan yang tidak rasional, serta melemahnya transparansi dan akuntabilitas publik. Ketegangan antara rasionalitas modern dan warisan tradisi menjadi benang merah yang menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak pernah berdiri di satu kutub saja.

Buku ini bukan upaya untuk menolak atau membenarkan praktik klenik, melainkan untuk memahaminya secara kritis sebagai bagian dari budaya politik. Dengan memahami konteksnya, pembaca diharapkan mampu melihat kepemimpinan Indonesia secara lebih utuh tidak hanya dari kebijakan yang terlihat, tetapi juga dari nilai, keyakinan, dan praktik yang bekerja di balik keputusan.